

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Agus Rusianto, *Dampak Peran Strategis Kepala Desa dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik*, Jakarta, 2004
- Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Media Indonesia, Jakarta, 2007
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Uliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984

- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Irma Devita Permatasari, *Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak mengatasi masalah hukum pertanahan*, Kaifa, Bandung, 2010
- Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), Surabaya, 2016
- Topo Santoso, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (cetakan kesatu), Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018
- Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (cetakan ke-1), Pranadamedia Group, Jakarta, 2016
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Cetakan ke satu), Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2017
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* (Cetakan Pertama), Kencana, Depok, 2017
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (cetakan ke-2), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (edisi pertama), Kencana, Jakarta, 2015
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangka Education, 2012

- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya* (edisi kedua), Kencana, Depok, 2017
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, 2013
- Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2008
- HR, Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Kewenangan Desa

Jurnal

Asyikin, Setiawan. 2020. “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi”, *Mimbar Hukum* 32 (1): 83.

Ayu, Fina. 2020. “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang”, *Notarius* 13 (2): 791.

Ayu, I Dewa. 2015. “Kepastian Hukum Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Hukum tò-rà* 1 (3): 203.

Luther, Martin. 2018. “Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, *Les Et Societatis* VI (8): 71.

Internet/sumber lainnya.

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved Mei 19, 2022, from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. 2018